Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Dinas Perhubungan

Kota Pasuruan

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Alamat	: Jl. Achmad Yani No. 53, Gadingrejo, Kota Pasuruan
Nomor Telepon	: +6281338960007
Website	: dishub.pasuruankota.go.id
E-mail	: dishubkotapasuruan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini sesuai harapan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai instansi pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami menyajikan berbagai informasi mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan selama satu tahun terakhir, meliputi pencapaian target, evaluasi program, pengendalian kinerja, dan sebagainya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini.

Pasuruan, 25 Februari 2026

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19770401 200003 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan kinerja optimal dalam mencapai target strategis tahun 2025. Sejumlah indikator kinerja utama berhasil tercapai secara penuh, mencerminkan efektivitas kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program.

Pada sasaran meningkatkan konektivitas dan pelayanan, Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan mencapai 100%, menandakan peningkatan infrastruktur yang sesuai rencana. Di bidang kualitas, perlengkapan jalan dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dalam kondisi baik juga mencapai 100%, menunjukkan pemeliharaan yang optimal dan kesiapan operasional.

Dalam aspek keselamatan pelayaran, pelanggaran tercatat 0% (di bawah target 39%), menggambarkan penegakan hukum yang efektif dan kepatuhan tinggi dari pelaku usaha. Sedangkan di bidang perkeretaapian, fasilitas keselamatan perkeretaapian dalam kondisi baik mencapai 100%, sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan publik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan kemajuan signifikan, didukung sinergi antar unit, alokasi anggaran efisien, dan monitoring yang terarah. Hasil ini menjadi fondasi kuat untuk inovasi dan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

COVER
KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 3
1.2.1 Isu Strategis 3
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 4
1.2.3 Dukungan SDM 5
1.2.4 Sarana Prasarana 6
1.2.5 Anggaran 7
1.3 Dasar Hukum 8
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 9
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 ... 11
1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKjIP 2024 .. 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA **16**
2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah 16
2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan 23
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 25
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **61**
3.1 Capaian Kinerja 61
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 61

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan 62
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 68
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 70
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 73
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 73
3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 79
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 77
3.2 Realisasi Anggaran 80
3.3 Inovasi 92
3.4 Penghargaan 93
BAB IV PENUTUP 94
4.1 Kesimpulan 94
4.2 Rekomendasi 96
LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dukungan SDM Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 5
Tabel 1.2 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.....6
Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025) 8
Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025 11
Tabel 1.5 Langkah Perbaikan Internal atas Rekomendasi LKjIP 2024 14
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025.....20
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.....25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025.....26
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025.....27
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025.....42
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025.....43
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 61
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 62
Tabel 3.3 Data Indikator 1.....63
Tabel 3.4 Data Indikator 2.....65
Tabel 3.5 Data Indikator 3.....66
Tabel 3.6 Data Indikator 4.....67
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja 68
Tabel 3.8 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 71
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....74

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....77
Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan....79
Tabel 3.12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 80
Tabel 4.1 Hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025.....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 5
Gambar 2.1 Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Periode RPJMD 2021-2026 16
Gambar 2.2 Misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terkait Perhubungan Periode RPJMD 2021-2026 17
Gambar 2.3 *Cascading* Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Periode RPJMD 2021-2026 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik harus memenuhi tiga unsur penting, yaitu organisasi pemberi layanan, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah terpenuhi dengan baik. LKjIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian, LKjIP Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan kebijakan publik dan pelayanan publik memegang peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di banyak instansi pemerintah telah menjadi hambatan bagi terwujudnya *good governance* di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat sistem pertanggungjawaban yang jelas dan terukur untuk mencegah praktik-praktik tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta memberikan akses yang sama pada informasi bagi masyarakat.

Penerapan *good governance* tidak hanya menjadi tuntutan publik, tetapi juga menjadi prasyarat bagi setiap pemerintah yang ingin mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun *good governance* yang berkelanjutan dan terus menerus diperbaiki. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik ini tidak hanya terkait dengan penyediaan *public goods* seperti jalan dan lain-lain, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan dan pembuatan kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang berbasis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025, diharapkan dapat terlihat sejauh mana kinerja pelayanan publik di sektor transportasi telah terpenuhi. LKjIP ini mencakup informasi tentang sasaran, program, dan capaian kinerja yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Dalam LKjIP ini dijelaskan berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yang telah terlaksana di tahun 2025, pengelolaan anggaran secara transparan, serta upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan terjangkau.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan di jalan raya, kurangnya fasilitas transportasi publik yang memadai, serta minimnya ketersediaan anggaran untuk pengembangan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah

pusat, swasta, maupun masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga harus didukung oleh penguatan *good governance* di semua instansi pemerintah. Hal ini termasuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan akses yang sama pada informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, LKjIP Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 ini akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam "***Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan***" terdapat beberapa isu strategis yang menggambarkan target kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Adapun isu strategis di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya Pengembangan Sistem Transportasi Terintegrasi;
b. Belum Optimalnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. Kurangnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat;
d. Belum Optimalnya Proses Penerbitan Izin Bidang Pelayaran;
e. Belum Maksimalnya Konektivitas Angkutan Barang dan Penumpang;
f. Belum Optimalnya Pembangunan Pelabuhan;
g. Belum Adanya Rencana Jaringan Transportasi Perkeretaapian Kewenangan Kota.

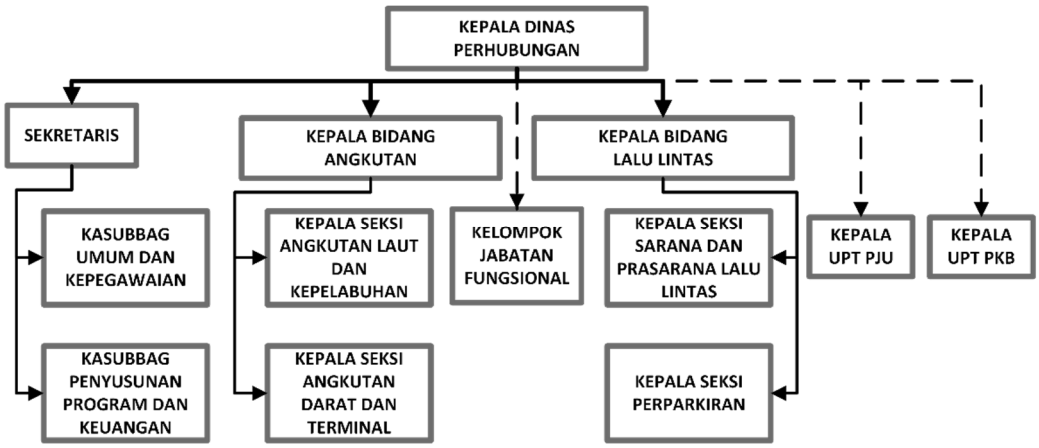
1.2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Perumusan Perencanaan Bidang Perhubungan;
b. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perhubungan yang Meliputi Angkutan Darat, Angkutan Laut, dan Lalu Lintas;
d. Pelaksanaan Pelayanan Umum Bidang Perhubungan;
e. Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Bidang Angkutan dan Lalu Lintas;
f. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Angkutan dan Lalu Lintas;
g. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Dinas Perhubungan; dan
h. Pembinaan Terhadap UPT.

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan



Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*

1.2.3 Dukungan SDM

Dukungan SDM di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah jumlah pegawai di berbagai unit kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi perhubungan. Telah diketahui struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan terdiri dari unit-unit seperti Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, serta Unit Pelaksana Teknis seperti Penerangan Jalan Umum dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang berperan dalam mendukung operasional dinas. Berikut ini merupakan dukungan SDM di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan :

Tabel 1.1 Dukungan SDM Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
ASN		

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
PNS	41	6
PPPK	5	1
Pendidikan		
SD/SMP/SMA	20	3
Diploma II / III	8	1
S1 / Diploma IV	13	4
S2/S3	4	0
Golongan		
I	0	0
II	21	4
III	17	2
IV	3	0

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*

1.2.4 Sarana Prasarana

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang berperan penting dalam mendukung tugas serta fungsi pengelolaan transportasi dan lalu lintas. Beberapa aspek utama terkait sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Jenis Sarana dan Prasarana	Rincian
Tanah	- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
Peralatan dan Mesin	- Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Laboratorium - Alat Persenjataan - Komputer - Alat Keselamatan Kerja

Jenis Sarana dan Prasarana	Rincian
	- Rambu-Rambu
Gedung dan Bangunan	- Bangunan Gedung - Monumen - Tugu Titik Kontrol
Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Jalan dan Jembatan - Instalasi - Jaringan

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*

1.2.5 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Anggaran di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan merupakan bagian vital dalam menjalankan berbagai kegiatan terkait infrastruktur transportasi dan mobilitas penduduk. Melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dana dialokasikan untuk mendukung pembangunan, perawatan, dan pengembangan sistem transportasi yang memadai. Dalam rentang dua tahun, yakni dari Tahun 2024 hingga 2025, terjadi perubahan pada alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Berikut adalah analisisnya :

Anggaran APBD Tahun 2024

- Total Anggaran: Rp 25.764.839.128

Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024

- Total Anggaran: Rp 23.825.691.594

Selisih dengan APBD Awal Tahun 2024: Rp 1.939.147.534 (turun). Terdapat penurunan sebesar Rp 1.939.147.534 dari APBD Awal Tahun 2024 ke Anggaran Perubahan Tahun 2024.

Anggaran APBD Tahun 2025

- Total Anggaran: Rp 21.937.058.744

Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025

- Total Anggaran: Rp 20.665.745.051

Selisih dengan APBD Awal Tahun 2025: Turun sebesar Rp 1.271.313.693. Pada Anggaran Perubahan Tahun 2025, terjadi penurunan tambahan sebesar Rp 1.271.313.693 dibanding APBD Awal Tahun tersebut.

Tahun 2024 ke 2025, terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 3.159.946.543. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dari Tahun 2024 hingga 2025, terjadi penurunan secara konsisten pada alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan secara keseluruhan terjadi penurunan yang signifikan pada Tahun 2025.

Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1 (2024)	Rp 25.764.839.128
P-APBD	Tahun n-1 (2024)	Rp 23.825.691.594
APBD	Tahun n (2025)	Rp 21.937.058.744
P-APBD	Tahun n (2024)	Rp 20.665.745.051

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota;
e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
i. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
j. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
k. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.3 Inovasi

3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang Dianggap Perlu

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 merujuk pada serangkaian tindakan korektif dan perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah sebagai respons atas evaluasi kinerja. Tindak lanjut ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi dalam pengelolaan kinerja organisasi. Proses ini melibatkan penyesuaian strategi, peningkatan koordinasi lintas sektoral, dan penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja agar selaras dengan kebijakan nasional dan standar evaluasi yang berlaku. Berikut ini merupakan hasil tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 :

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	5
1	Menyesuaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang antara sasaran, indikator, perumusan hasil harus selaras dan target dengan realisasi bisa tercapai realistis maupun menantang	Menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan keselarasan sasaran dan indikator	Melakukan validasi dan *review* bersama pimpinan serta tim perencana secara berkala	Triwulan 1 Dokumen Perencanaan 2026	Selesai

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	5
2	Melaksanakan perencanaan kinerja yang memadai mulai dari pimpinan sampai ke bawah serta ditetapkan tepat waktu lalu diketahui, dipahami, dan menjadi kepedulian setiap pegawai Unit Kerja	Sosialisasi dan pelatihan penyusunan perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai Unit Kerja	Melakukan monitoring pelaksanaan perencanaan dan memberikan *feedback* rutin	Triwulan 2 Dokumen Perencanaan 2026 dengan Evaluasi Berkala mulai Triwulan 1	Selesai
3	Melaksanakan rapat internal berkala triwulan atas setiap capaian kinerja sehingga capaian kinerja triwulan selanjutnya semakin baik dengan pimpinan selalu hadir sebagai *decision maker* dan didokumentasikan, sehingga terdapat rekomendasi serta rencana aksi yang	Menjadwalkan rapat triwulan internal dan menyiapkan agenda serta dokumentasi rapat	Menindaklanjuti hasil rapat dengan membuat notulensi dan pengawasan implementasi rencana aksi	Setiap Akhir Triwulan	Selesai

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5	5
	tepat untuk memaksimalkan realisasi atas target kinerja nantinya				
4	Membuat Laporan Hasil Evaluasi Internal OPD atas penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja dan rekomendasi ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang sesuai sehingga atas rekomendasi laporan hasil evaluasi internal sehingga kinerja perangkat daerah lebih akuntabel, efektif, dan efisien	Menyusun format laporan evaluasi internal dan mendiseminasikan kepada seluruh OPD terkait	Melakukan *review* laporan dan memperbaiki kekurangan berdasarkan masukan yang diterima	Triwulan 3 atau sebelum penerbitan Dokumen LHE	Selesai

Sumber : *Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*

1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKjIP 2024

Langkah Perbaikan Internal Perangkat Daerah (PD) atas Rekomendasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 adalah serangkaian upaya yang diambil untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi evaluasi atas kinerja instansi. Tindakan ini dirancang untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berikut ini merupakan langkah perbaikan internal Dinas Perhubungan Kota Pasuruan atas rekomendasi LKjIP 2024 :

Tabel 1.5 Langkah Perbaikan Internal atas Rekomendasi LKjIP 2024

No.	Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Langkah Perbaikan
1	Melaksanakan pengukuran kinerja yang memadai terutama terkait efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja dan memberikan pemahaman atas hasil pengukuran kinerja kepada setiap pegawai pada tiap unit kerja sehingga meningkatkan kepeduliannya terhadap capaian kinerja organisasi	Mengadakan rapat rutin tiap tribulan untuk membahas capaian kinerja dan penggunaan anggaran, serta memberikan umpan balik langsung kepada setiap pegawai
2	Menginformasikan kualitas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada laporan kinerja sehingga dapat dimanfaatkan informasi tersebut untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Melaksanakan sesi diskusi singkat setelah setiap selesai kegiatan dilaksanakan untuk membahas capaian dan hambatan yang dihadapi
3	Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dengan Dinas Komunikasi,	Menjadwalkan pertemuan bulanan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan

No.	Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan	Langkah Perbaikan
	Informatika dan Statistika Kota Pasuruan atas data yang disajikan pada *satudata.pasuruankota.go.id*	Statistika Kota Pasuruan untuk membandingkan dan memperbarui data secara langsung baik secara *online* maupun tatap muka
4	Meningkatkan kualitas dan implementasi atas dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja melalui beberapa upaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja	Mengadakan pelatihan singkat bagi pegawai tentang cara mengisi dan melaporkan data pengukuran kinerja dengan benar
5	Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal sehingga dapat meningkatkan kinerja selanjutnya	Mengadakan sesi *brainstorming* untuk mengidentifikasi solusi dan rencana yang dapat diterapkan dalam waktu satu bulan kedepan

Sumber : *LHE Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Perhubungan Kota Pasuruan perlu adanya sasaran strategis demi tercapainya misi dan visi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang di RPJMD Tahun 2021-2026.

Gambar 2.1 Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Periode RPJMD 2021-2026

VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN PERIODE RPJMD 2021-2026



Sumber : *RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026*

MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN PERIODE RPJMD 2021-2026

I. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan
II. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan
III. Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata
IV. Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif

Gambar 2.2 Misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terkait Perhubungan Periode RPJMD 2021-2026



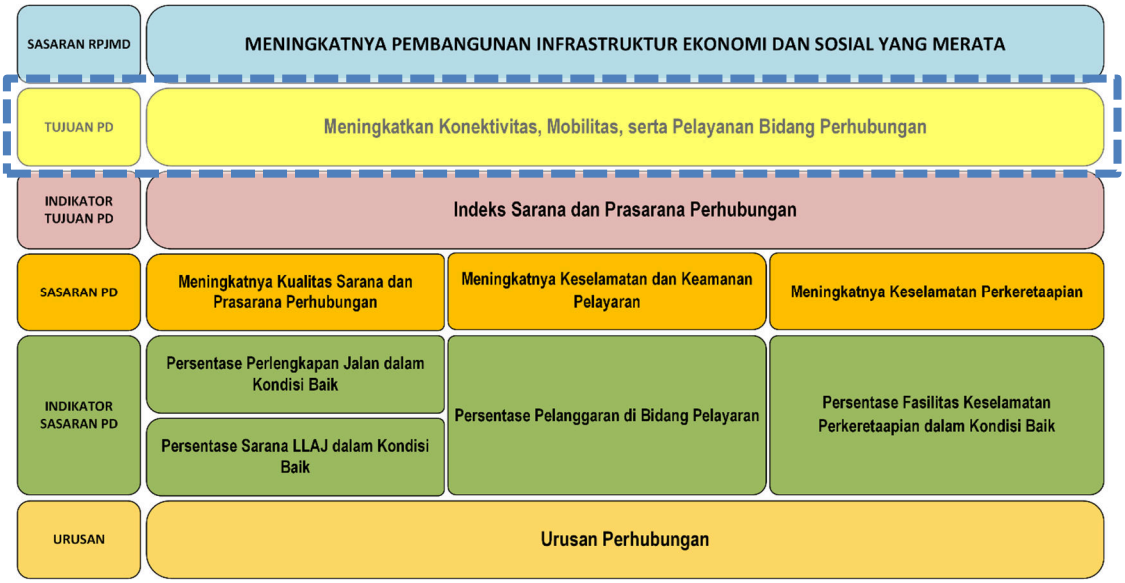
Sumber : *RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026*

Dari 4 (empat) misi Walikota dan Wakil Walikota periode RPJMD 2021-2026 tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan memiliki kontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 yaitu "***Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan***" dengan isu strategis dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Aman, Tentram, Tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta Penguatan Mitigasi Bencana;
2. Penyediaan Perumahan dan Penanganan Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Aman dan Nyaman;
3. ***Peningkatan Konektifitas dan Mobilitas Orang dan Barang yang Didukung oleh Sistem Transportasi Cerdas***;
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan dalam Kondisi Baik dan Laik Fungsi.

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan yang mendukung misi Walikota dan Wakil Walikota terlihat pada bagan *cascading* di bawah ini.

Gambar 2.3 *Cascading* Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Periode RPJMD 2021-2026



Sumber : *Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026*

Secara umum Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perhubungan Kota Pasuruan untuk Tahun 2021-2026 sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan		**Indikator Tujuan :** Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	100%	100%	100%	100%
		(1) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	**Indikator Sasaran :** **(1)** Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik **(2)** Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	70% 70%	80% 80%	90% 90%	100% 100%	100% 100%
		(2) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Indikator Sasaran : • Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	48%	45%	42%	39%	36%
		(3) Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Indikator Sasaran : • Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : *Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026*

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumusan Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	1.1	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai	Mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam sektor perhubungan untuk memantau dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang ada, sehingga dapat mendukung kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat	$(\boldsymbol{S}.\ \mathbf{45}\%) + (\boldsymbol{P}.\ \mathbf{45}\%) + (\boldsymbol{L}.\ \mathbf{5}\%) + (\boldsymbol{K}.\mathbf{5}\%)$ (P) = Hasil Indikator Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik (S) = Hasil Indikator Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik (L) = Hasil Indikator Kelayakan Infrastruktur Pelayaran (belum ada) (K) = Hasil Indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	Data Primer Dinas Perhubungan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/Rumusan Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.1	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	Perlengkapan jalan adalah bagian dari Prasarana LLAJ sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rambu Jalan, *Traffic Light*, dll.)	Jumlah : (Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik dibagi Total Jumlah Perlengkapan Jalan) dibagi Jumlah : (Item Perlengkapan Jalan) x 100%	Data Primer Dinas Perhubungan
		2.2	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	%	Contoh sarana LLAJ adalah *barrier*, *traffic cone*, rambu *portable* dll.	Jumlah : (Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik dibagi Total Jumlah Sarana LLAJ) dibagi Jumlah : (Item Sarana LLAJ) x 100%	Data Primer Dinas Perhubungan
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	3.1	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	%	Jumlah pelanggaran yang terjadi dalam sektor pelayaran, seperti pelanggaran keselamatan, pelanggaran aturan navigasi, pelanggaran izin operasi, dan pelanggaran lainnya	Jumlah : (Pelanggaran Pelayaran) dibagi Total : (Sampel yang Diperiksa) x 100%	Data Sekunder dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Sample Data Primer Survey oleh Bidang Teknis
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	4.1	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	%	Fasilitas keselamatan perkeretaapian yang dinyatakan dalam kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan berkala terhadap sarana dan prasarana kereta api	Jumlah : (Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik) dibagi Total : (Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian) x 100%	Data Primer Dinas Perhubungan

Sumber : *IKU Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025*

Tahun 2025 adalah masa transisi dimana RPJMD Tahun 2021-2026 beririsan dengan RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan terpilih Tahun 2025–2029 adalah ***PASURUAN ANUGRAH*** "***Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya Dan Indah Kotanya***", dengan 5 misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Melalui Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Inklusif dan Berkualitas.
3. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial.
5. Mewujudkan Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan pada periode pelaporan kinerja ini masih menggunakan indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD Periode 2021-2026 dikarenakan :

1. Tahun 2025 secara substantif masih merupakan bagian dari siklus pembangunan periode RPJMD 2021–2026.
2. Dokumen RPJMD periode 2025-2029 belum sepenuhnya menjadi dasar pelaksanaan program dan penganggaran tahun 2025, sehingga indikator kinerja yang disusun untuk periode 2025-2029 belum relevan untuk dilaksanakan tahun 2025. Penyesuaian indikator kinerja berdasarkan RPJMD dan Renstra periode 2025–2029 akan mulai digunakan sebagai dasar pelaporan kinerja pada tahun berikutnya setelah dokumen tersebut ditetapkan dan menjadi dasar perencanaan serta penganggaran secara penuh.

3. Asumsi logis dimana LKjIP pada dasarnya melaporkan kinerja atas Perjanjian Kinerja (PK), DPA, dan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Jika APBD 2025 masih disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD 2021–2026, maka pelaporan tetap logis merujuk pada dokumen tersebut.

2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam "***Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan***" terdapat beberapa strategi dan arah kebijaan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, berikut adalah strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :

- Strategi

1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi dan lalu lintas.
2) Perbaikan dan peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas.
3) Peningkatan penegakan hukum dalam berlalu lintas.
4) Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum.
5) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola moda transportasi.
6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayaran.
7) Penyelarasan peraturan di bidang pelayaran dengan implementasi pelaksanaannya.
8) Revitalisasi, pengembangan, serta fasilitasi perizinan angkutan laut dan pelabuhan.
9) Perbaikan dan peningkatan fasilitas keselamatan perkeretaapian.

- Arah Kebijakan

1) Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas.
2) Melaksanakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi.
3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban lalu lintas.
4) Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terhadap penyelenggara moda transportasi.
5) Melaksanakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayaran.
6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah Provinsi dan Pusat, serta instansi terkait di wilayah pelayaran dan pelabuhan.
7) Melaksanakan sosialisasi terkait perizinan di bidang pelayaran.
8) Meningkatkan sarana dan prasarana perkeretaapian.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan layanan dan infrastruktur transportasi di Kota Pasuruan, Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pasuruan memiliki fokus yang jelas. Tujuannya adalah untuk ”*Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan*” Kota Pasuruan. Sasaran yang telah ditetapkan mencakup peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta keselamatan perkeretaapian. Indikator keberhasilan yang dituangkan dalam tabel di bawah ini secara jelas menggambarkan upaya konkret yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan			Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai	100
		1.1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	%	100
				Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	%	100
		1.2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	%	39
		1.3	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	%	100

Sumber : *Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025*

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mencakup beberapa aspek penting yang diukur melalui indikator tertentu. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II
Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100
3	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%
5	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%

Sumber : *Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025*

Program	**Anggaran**
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.583.490.429
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.128.576.015
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 48.130.600
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 1.176.861.700

Untuk memahami alokasi anggaran secara rinci, perlu diperhatikan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang merupakan pedoman utama dalam pengalokasian anggaran untuk

setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Berikut ini adalah tabel rangkuman berdasarkan DPA Tahun 2025 :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Terfasilitasinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan)	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja)	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Keuangan)	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Terlaksananya Pembayaran Rutin Gaji dan Tunjangan ASN)		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah)	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur)	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran)	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Tersedianya Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran)	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38 Unit

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpelihara dan Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (Terpeliharanya Mebel)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	41 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Terpelihara dan Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	80%
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	30%
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	7 Unit

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	55 Unit
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Terpeliharanya Prasarana Jalan)	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75 Unit
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Terpeliharanya Perlengkapan Jalan)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	23 Unit
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Terlaksananya Peningkatan Kelayakan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	100%
	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang))	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Terselenggaranya Pelayanan Perparkiran)	Persentase Parkir yang Tertib	90%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota)		
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tersedianya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin (Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin)	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	1 Laporan
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlayaninya Ruas Jalan oleh Angkutan Umum)	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	69%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	1 Unit

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Program Pengelolaan Pelayaran (Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran)	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*)	45%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	61%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota)		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha (Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha)	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota)		
	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Terfasilitasinya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau)	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau (Terbangunnya Dermaga Sungai dan Danau)	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dilakukan Pembangunan	0 Unit
	Program Pengelolaan Perkeretaapian (Terlaksananya Pengelolaan Perkeretaapian)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	16,7%
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian (Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian)	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian (Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian)	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	2 Laporan

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025*

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.583.490.429
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	7.065.700
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	4.179.900
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	2.885.800
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	6.688.266.629
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	6.649.217.129
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	39.049.500
C	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	41.820.900
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	41.820.900
D	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	3.183.200
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	3.183.200
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	149.922.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Rp	3.279.800

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	10.234.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	4.408.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp	10.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	12.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	110.000.000
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	912.749.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.210.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	460.000.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	449.539.300
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	780.482.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	42.370.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	606.810.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp	4.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	27.930.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	99.372.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	12.128.576.015
A	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	7.680.107.615
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	163.900.200

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	590.826.200
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp	5.825.913.515
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp	1.099.467.700
B	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp	87.085.000
	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp	87.085.000
C	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp	3.932.710.600
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	3.932.710.600
D	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	128.310.750
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	45.920.600
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	82.390.150
E	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	49.900.000
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	49.900.000
F	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp	77.359.900
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp	77.359.900
G	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	164.609.750
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	64.663.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Rp	99.946.550

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
	Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
H	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.492.400
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.492.400
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	48.130.600
A	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.339.400
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	7.339.400
B	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp	3.236.500
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	3.236.500
C	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp	37.554.700
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp	37.554.700
	Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp	0
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	1.176.861.700
A	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Rp	1.176.861.700

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Rp 1.176.861.700

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025*

Pada tanggal 3 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	100
3	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	100%
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%	100%
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%	39%
5	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025*

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.717.621.425
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 10.617.269.026
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 262.828.400
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 1.068.026.200

Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Terfasilitasinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan)	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	90%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja)	Persentase Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Keuangan)	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Terlaksananya Pembayaran Rutin Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah)	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur)	Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran)	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Tersedianya Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran)	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	(Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpelihara dan Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (Terpeliharanya Mebel)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	25 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Terpelihara dan Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	80%
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	30%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	14 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	73 Unit
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Terpeliharanya Prasarana Jalan)	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	75 Unit
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Terpeliharanya Perlengkapan Jalan)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Terlaksananya Peningkatan Kelayakan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	100%
	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang))	Jumlah Terminal yang Direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Terselenggaranya Pelayanan Perparkiran)	Persentase Parkir yang Tertib	90%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tersedianya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Dokumen
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota)	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin (Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin)	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	1 Laporan
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlayaninya Ruas Jalan oleh Angkutan Umum)	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	69%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota)		
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Program Pengelolaan Pelayaran (Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran)	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*)	45%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	61%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota)		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha (Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha)	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang Diselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai	1 Laporan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota)	dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Terfasilitasinya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau)	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen
	Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau (Terbangunnya Dermaga Sungai dan Danau)	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dilakukan Pembangunan	1 Unit

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pengelolaan Perkeretaapian (Terlaksananya Pengelolaan Perkeretaapian)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	16,7%
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian (Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian)	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian (Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian)	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	2 Laporan

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025*

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.717.621.425
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.607.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.821.800
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 785.800
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 7.127.192.653
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7.088.502.053
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 38.690.600
C	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 38.741.200
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 38.741.200

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	
D	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	1.591.600
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	1.591.600
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	132.466.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	2.940.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	5.117.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	4.408.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp	4.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	6.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	110.000.000
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	873.062.072
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1.600.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	460.000.072
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	411.462.000
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	541.960.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	30.888.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	440.704.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp	3.200.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	17.580.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	49.588.000

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	10.617.269.026
A	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	7.323.548.226
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	285.813.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp	597.508.350
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp	2.730.823.576
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp	3.709.402.700
B	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp	87.085.000
	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp	87.085.000
C	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp	2.501.203.800
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	2.501.203.800
D	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	303.024.950
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	33.438.800
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp	269.586.150
E	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	34.700.000
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	34.700.000
F	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp	76.659.500
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp	76.659.500
G	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	286.875.750

	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	164.117.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	122.758.750
H	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.171.800
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.171.800
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	262.828.400
A	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.630.900
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	3.630.900
B	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Rp	1.494.300
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	1.494.300
C	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp	257.703.200
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp	27.703.200

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Anggaran	
		Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp	230.000.000
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Rp	1.068.026.200
A	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Rp	1.068.026.200
		Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Rp	1.068.026.200

Sumber : *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025*

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam upaya mencapai kinerja yang optimal, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah mengidentifikasi sejumlah faktor pendorong yang berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Faktor-faktor ini tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan, tetapi juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendorong tersebut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

   Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas utama. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan moda transportasi dan keselamatan transportasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Koordinasi dengan Instansi Terkait

   Koordinasi yang efektif dengan instansi pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk penertiban lalu lintas dan pengelolaan transportasi. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan aktif melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua

kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana dan dapat diimplementasikan dengan baik.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

   Investasi dalam sarana dan prasarana transportasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berkomitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur transportasi, termasuk rambu-rambu jalan, penerangan jalan umum, terminal, dan fasilitas keselamatan perkeretaapian, guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

4. Penegakan Hukum dan Regulasi

   Penegakan hukum yang tegas dalam berlalu lintas dan pelayaran menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berupaya untuk memastikan bahwa semua peraturan dan regulasi di bidang transportasi dipatuhi oleh semua pihak, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan keselamatan.

5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

   Melakukan evaluasi kinerja secara berkala adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menyusun laporan capaian kinerja yang mencakup analisis terhadap hasil yang dicapai dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

6. Penggunaan Teknologi

   Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan transportasi, seperti sistem transportasi cerdas (*Command Center Room*), dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berkomitmen untuk mengadopsi teknologi terbaru untuk menunjang manajemen lalu lintas.

7. Partisipasi Masyarakat

   Mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program transportasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap

peraturan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan aktif melakukan sosialisasi dan kampanye untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Skala capaian kinerja menunjukkan sejauh mana perangkat daerah berhasil mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Skala capaian kinerja ini dapat mencakup parameter atau indikator tertentu yang menggambarkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian suatu sasaran. Predikat nilai capaian dapat dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Survey Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Survey Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
2	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%	0%	100%	Sangat Tinggi	Data Sekunder dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan *Sample* Data Primer Survey oleh Bidang Teknis
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Survey Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*

Uraian penjelasan hasil Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

1. Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik

   Perlengkapan jalan merupakan bagian dari prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga menjadi bagian dari kegiatan vital pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dimana yang termasuk ke dalam *item* perlengkapan jalan diantaranya yaitu Rambu Lalu Lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), *Guardrail*, *Delineator*, Cermin Tikungan, *Traffic Light*, *Warning Light*, Marka Jalan, *Pelican Crossing*, Papan Informasi Lalu Lintas, dan Penerangan Jalan Umum. Capaian indikator Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik diukur menggunakan formula berikut :

$$Jumlah\ \%\ dalam\ Kondisi\ Baik$$

$$= \sum \frac{Perlengkapan\ Jalan\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan}\ x\ 100\%$$

$$Jumlah\ \%\ dalam\ Kondisi\ Baik = 1100\%$$

$$Total\ Item\ (Pembagi) = \sum Item\ Perlengkapan\ Jalan$$

$$Total\ Item\ (Pembagi) = 11\ Item$$

$$\frac{(\sum \frac{Perlengkapan\ Jalan\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Perlengkapan\ Jalan}\ \text{x}\ 100\ \%)}{\sum Item\ Perlengkapan\ Jalan} = \frac{1100\ \%}{11} = 100{,}00\ \%$$

dengan rincian hasil capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Data Indikator 1

No	Jenis Fasilitas	Jumlah						
		Kebutuhan	Tersedia	Kondisi Baik	Kondisi Buruk	Presentase Kondisi Baik	Presentase Kelayakan	Satuan
1	Rambu Lalu Lintas	1.086	782	782	0	100,00%	72,01%	unit
2	RPPJ	71	63	63	0	100,00%	88,73%	unit
3	*Guardrail*	720	695	695	0	100,00%	96,53%	meter
4	*Delineator*	530	436	436	0	100,00%	82,26%	unit

No	Jenis Fasilitas	Jumlah						
		Kebutuhan	Tersedia	Kondisi Baik	Kondisi Buruk	Presentase Kondisi Baik	Presentase Kelayakan	Satuan
5	Cermin Tikungan	65	57	57	0	100,00%	87,69%	unit
6	*Traffic Light*	17	15	15	0	100,00%	88,24%	lokasi
7	*Warning Light*	59	42	42	0	100,00%	71,19%	lokasi
8	Marka Jalan	51.513	33.004	33.004	0	100,00%	64,07%	m2
9	*Pelican Crossing*	6	3	3	0	100,00%	50,00%	lokasi
10	Papan Informasi Lalu Lintas	36	30	30	0	100,00%	83,33%	unit
11	Tiang PJU	2.783	2.738	2.738	0	100,00%	98,38%	unit
	Rata-Rata					**100,00%**		

Sumber : *Survey Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025*

2. Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik

   Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan bagian untuk mencapai tujuan keselamatan LLAJ sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga menjadi bagian dari kegiatan vital pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dimana yang termasuk ke dalam *item* sarana LLAJ diantaranya yaitu Rambu *Portable* berupa *Traffic Cone*, *Barrier*, Barikade, Rambu Stop, dan Rambu Panah. Capaian indikator Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik diukur menggunakan formula berikut :

$$Jumlah\ \%\ dalam\ Kondisi\ Baik = \sum \frac{Sarana\ LLAJ\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Sarana\ LLAJ}\ x\ 100\%$$

$$Jumlah\ \%\ dalam\ Kondisi\ Baik = 500\ \%$$

$$Total\ Item\ (Pembagi) = \sum Item\ Sarana\ LLAJ$$

$$Total\ Item\ (Pembagi) = 5\ Item$$

$$\frac{(\sum \frac{Sarana\ LLAJ\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Sarana\ LLAJ}\ \text{x}\ 100\ \%)}{\sum Item\ Sarana\ LLAJ} = \frac{500\%}{5} = 100{,}00\ \%$$

dengan rincian hasil capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4 Data Indikator 2

No	Jenis Fasilitas	Jumlah					
		Kebutuhan	Tersedia	Kondisi Baik	Kondisi Buruk	Persentase	Satuan
	Rambu *Portable*						
1	*Traffic Cone*	300	114	114	0	100,00%	Unit
2	*Barrier*	200	136	136	0	100,00%	Unit
3	Barikade	50	39	39	0	100,00%	Unit
4	Rambu Stop	25	3	3	0	100,00%	Unit
5	Rambu Panah	25	1	1	0	100,00%	Unit
	Rata-Rata					**100,00%**	

Sumber : *Survey Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025*

3. Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran

   Pelanggaran di Bidang Pelayaran merupakan bagian untuk mencapai tujuan keselamatan pelayaran sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga menjadi bagian dari kegiatan vital pada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dimana capaian indikator diperoleh dengan memperhatikan kesesuaian izin terutama pada beberapa badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang pelayaran. Capaian indikator Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran diukur menggunakan formula berikut :

$$\left(\frac{Jumlah\ Pelanggaran\ Pelayaran}{Total\ Sample\ yang\ Diperiksa}\right) \text{ x } 100\ \% = \left(\frac{0}{3}\right) \text{ x } 100\ \%$$

   dengan rincian hasil capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Indikator 3

No	Keterangan	Jumlah
1	*Sample* Badan Usaha Pelayaran	3
2	Badan Usaha yang Belum Memenuhi Syarat Izin Usaha	0
Persentase Pelanggaran		**(0/3) x 100% = 0 %**

Sumber : *Survey Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025*

4. Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik

   Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik, terutama terkait dengan palang pintu perlintasan sebidang dan pos penjaga palang pintu perkeretaapian, mencakup berbagai aspek untuk memastikan keselamatan selama perlintasan kereta. Capaian indikator Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik diukur menggunakan formula berikut :

$$\frac{\left(\sum \frac{Fasilitas\ Keselamatan\ Perkeretaapian\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Fasilitas\ Keselamatan\ Perkeretaapian}\right) x\ 100\ \%}{\sum Item\ Fasilitas\ Keselamatan\ Perkeretaapian}$$

$$Jumlah\ \%\ dalam\ Kondisi\ Baik$$

$$= \sum \frac{Fas.Keselamatan\ Perkeretaapian\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Fas.Keselamatan\ Perkeretaapian}\ x\ 100\%$$

$$Jumlah\ \%\ dalam\ Kondisi\ Baik = 100\ \%$$

$$Total\ Item\ (Pembagi) = \sum Item\ Fas.Keselamatan\ Perkeretaapian$$

$$Total\ Item\ (Pembagi) = 1\ Item$$

$$\frac{(\sum \frac{Fas.Keselamatan\ Perkeretaapian\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Jumlah\ Fas.Keselamatan\ Perkeretaapian}\ \text{x}\ 100\ \%)}{\sum Item\ Fas.Keselamatan\ Perkeretaapian}$$

$$= \frac{100\ \%}{1} = 100\ \%$$

Tabel 3.6 Data Indikator 4

No.	Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Alamat	Keterangan	Rencana	Ketersediaan	Kondisi
1	JPL 133 KM 63+912	Jalan Cemara, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Petak Jalur antara Stasiun Pasuruan - Stasiun Rejoso Lintas Bangil - Banyuwangi	Tahun 2023	Ada	Baik
2	JPL 123 KM 60+70	Jalan Kalirejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan	Petak Jalur antara Stasiun Bangil - Stasiun Pasuruan Lintas Bangil - Banyuwangi	Tahun 2024-2025	Ada	Baik
3	JPL 137 KM 65+3/4	Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Petak Jalur antara Stasiun Pasuruan - Stasiun Rejoso Lintas Bangil - Banyuwangi	Tahun 2024-2025	Ada	Baik
4	JPL - KM 65+8/9	Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Petak Jalur antara Stasiun Pasuruan - Stasiun Rejoso Lintas Bangil - Banyuwangi	Tahun 2024-2025	Ada	Baik

No.	Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Alamat	Keterangan	Rencana	Ketersediaan	Kondisi
5	JPL 138 KM 65+619	Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Petak Jalur antara Stasiun Pasuruan - Stasiun Rejoso Lintas Bangil - Banyuwangi	Tahun 2024-2025	Ada	Baik
6	JPL 136 KM 64+9/0	Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan	Petak Jalur antara Stasiun Pasuruan - Stasiun Rejoso Lintas Bangil - Banyuwangi	Tahun 2024-2025	Ada	Baik
% Kondisi Baik					**100,00%**	

Sumber : *Survey Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025*

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	73,25	78,50	82,02	100	100,00	100,00%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	86,75%	85,59%	86,03%	100%	100,00%	100,00%
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	76,03%	77,75%	85,13%	100%	100,00%	100,00%
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	83,33%	75%	75%	39%	0,00%	100,00%
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	0,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan konektivitas, mobilitas, serta pelayanan dalam bidang perhubungan. Salah satu indikator kinerja yang mencerminkan hal ini adalah Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan. Realisasi pada tahun 2022 mencapai angka 73,25, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 78,50, hingga pada tahun 2024 meningkat secara signifikan mencapai 86,02, dan pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan sebesar 100.

Dalam menghadirkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang prima, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

berhasil menjaga kondisi baik perlengkapan jalan dan sarana LLAJ pada tahun 2025, dengan realisasi masing-masing sebesar 100,00%, dan capainnya sebesar 100,00%.

Terakhir, dalam memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah melakukan usaha untuk meningkatkan capaian kinerja karena realisasi pada tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024 yaitu 0% pelanggaran di bidang pelayaran yang melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 39% sehingga capaiannya sebesar 100%. Pada keselamatan perkeretaapian, terdapat progres yang baik dimana fasilitas keselamatan perkeretaapian pada tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024, yaitu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat capaian positif pada sebagian besar indikator kinerja, perlu adanya fokus pada peningkatan pelaksanaan sasaran untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Upaya berkelanjutan dalam mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan akan terus memperkuat peran Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam meningkatkan pelayanan dan keselamatan dalam sektor perhubungan.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100%
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,00	100	100,00%
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100,00%	100%	100,00%
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100,00%	100%	100,00%
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	0%	36%	100,00%
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah mencapai sejumlah kemajuan yang positif dalam mencapai target jangka menengah yang tertera dalam dokumen Rencana Strategis Periode 2021-2026.

Pertama, terkait tujuan meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pelayanan di bidang perhubungan, indikator kinerja Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan mencapai tingkat kemajuan sebesar 100,00% pada tahun 2025, meskipun masih belum berada pada akhir periode RPJMD namun target rencana strategis telah mencapai 100%. Pencapaian ini menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan infrastruktur perhubungan. Hal yang mendukung dalam upaya pemenuhan target kinerja jangka menengah adalah karena beberapa kegiatan pendukung tujuan

telah selesai dilaksanakan sebelum akhir tahun perencanaan jangka menengah selesai.

Kedua, sasaran meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan terlihat dari persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, yang terealisasi 100,00% pada tahun 2025, mencapai target rencana strategis 100%. Begitu pula dengan sarana LLAJ yang terealisasi 100,00%, menunjukkan perhatian terhadap kualitas infrastruktur perhubungan. Hal yang mendukung dalam upaya pemenuhan target kinerja jangka menengah adalah karena beberapa kegiatan pendukung telah dilaksanakan sebelum akhir tahun perencanaan jangka menengah selesai.

Ketiga, dalam konteks keselamatan dan keamanan pelayaran, persentase pelanggaran di bidang pelayaran masih telah melampaui target rencana strategis sebesar 36%, dengan realisasi mencapai 0% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat dukungan penuh dari Dinas Perhubungan Kota Pasuruan guna memenuhi target akhir rencana strategis. Dukungan dalam upaya pemenuhan target kinerja jangka menengah tersebut adalah kemampuan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap aktivitas pelayaran yang telah dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia yang tersedia.

Terakhir, keselamatan perkeretaapian yang diukur dari persentase fasilitas keselamatan perkeretaapian dalam kondisi baik mencapai 100% pada tahun 2025, sesuai dengan target rencana strategis. Capaian ini mencerminkan komitmen dalam menjaga fasilitas keselamatan dalam sistem perkeretaapian. Hal ini didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan telah tersertifikasi untuk selalu menjaga fasilitas keselamatan perkeretaapian dalam kondisi baik.

Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah berhasil mencapai semua target positif dalam menghadapi target jangka menengahnya. Kemajuan yang dicapai menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanan di sektor perhubungan.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tidak dapat membandingkan kinerja tahun 2025 dengan standar nasional maupun provinsi serta daerah lainnya karena tidak ada kesamaan indikator pengukur kinerja di tingkat nasional maupun provinsi serta daerah kabupaten/kota lainnya yang sesuai dengan kondisi khusus Kota Pasuruan. Indikator kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tersebut dirancang untuk mencerminkan karakteristik unik wilayah Kota Pasuruan, sehingga perbandingan langsung dengan standar nasional maupun provinsi serta daerah kabupaten/kota lainnya menjadi tidak memungkinkan.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	100,00	100,00%	Kompeten dalam melaksanakan seluruh target sasaran secara optimal sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan alokasi anggaran, perbaikan perencanaan, dan kolaborasi dengan *stakeholder*
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	100,00%	100,00%	Capaian pada Persentase Perlengkapan Jalan terpenuhi, karena perencanaan kebutuhan perbaikan perlengkapan jalan telah dilakukan secara komprehensif	Berfokus pada pemeliharaan rutin, evaluasi material, dan penerapan teknologi pemantauan
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%	100,00%	100,00%	Capaian pada Persentase Sarana LLAJ terpenuhi, karena perencanaan kebutuhan perbaikan sarana LLAJ telah dilakukan secara komprehensif	Peningkatan pemeliharaan, penggunaan teknologi monitoring, dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kualitas sarana LLAJ
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%	0%	100,00%	Sumber daya manusia dan teknis mempermudah kemampuan Dinas Perhubungan dalam	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan teknis untuk

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						melakukan pengawasan secara efektif terhadap aktivitas pelayaran	melakukan pengawasan secara teratur dan efektif terhadap aktivitas pelayaran
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan perencanaan yang matang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	*Sharing best practice* dengan pihak terkait dan penerapan inovasi teknologi

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mencapai keberhasilan dalam beberapa aspek kinerja, namun juga menghadapi tantangan yang memerlukan solusi terkait pencapaian target jangka menengah pada tahun 2025. Dalam mencapai tujuan meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pelayanan bidang perhubungan, tidak terdapat kendala pada Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan yang mencapai 100, sesuai target nilai indeks 100. Faktor pendukung yang menyebabkan target tercapai adalah kompeten dalam melaksanakan seluruh target sasaran secara optimal sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan. Dalam mencapai target, Dinas Perhubungan merespon dengan mengalokasikan anggaran lebih besar serta melakukan evaluasi mendalam terkait faktor teknis yang mempengaruhi capaian tersebut, dan selalu berkolaborasi dengan *stakeholder* untuk saling membantu dalam pemenuhan tujuan bersama meningkatkan konektivitas, mobilitas, serta pelayanan bidang perhubungan.

Dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, terdapat capaian positif pada persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik (100,00%) dan persentase

sarana LLAJ dalam kondisi baik (100,00%) yang telah memenuhi target. Faktor pendukung dari tercapainya target persentase perlengkapan jalan dan sarana LLAJ dalam kondisi baik adalah perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan dan sarana LLAJ telah dilakukan secara komprehensif serta memperhitungkan perkembangan jangka panjang. Meskipun terdapat peningkatan, pemeliharaan rutin perlu untuk tetap ditingkatkan dan perlu adanya penerapan teknologi pemantauan untuk menjaga kualitas infrastruktur. Kemudian, terkait keselamatan dan keamanan pelayaran, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mencapai realisasi sebesar 0% pelanggaran, di atas target 39% pelanggaran. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya sumber daya manusia dan teknis sehingga mempermudah kemampuan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam melakukan pengawasan secara efektif terhadap aktivitas pelayaran. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, namun tentu masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut termasuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan teknis untuk melakukan pengawasan secara teratur dan efektif terhadap aktivitas pelayaran.

Terakhir, pada aspek keselamatan perkeretaapian, Dinas Perhubungan berhasil mencapai target 100% pada persentase fasilitas keselamatan perkeretaapian dalam kondisi baik. Keberhasilan ini didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan perencanaan yang matang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga fasilitas keselamatan perkeretaapian tetap dalam kondisi baik sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, terdapat keberhasilan dalam mencapai seluruh target, analisis mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan dan mengevaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan. Evaluasi

berkala dan adaptasi terhadap perubahan dinamis menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	100,00	100,00%	11.948.123.626	9.257.871.239	77,48%	22,52%
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	100,00%	100,00%	7.434.907.726	6.824.564.737	91,79%	8,21%
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%	100,00%	100,00%	3.182.361.300	1.272.954.669	40,00%	60%
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%	0,00%	100,00%	262.828.400	254.560.988	96,85%	3,15%
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100,00%	100,00%	1.068.026.200	905.790.845	84,81%	15,19%

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mengalami variasi efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja organisasinya pada beberapa aspek strategis. Dalam mencapai tujuan meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pelayanan bidang perhubungan dengan indikator Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan, terjadi efisiensi anggaran sebesar 22,52%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran hampir sesuai dengan capaian yang diharapkan.

Pada sasaran lainnya terkait kualitas sarana dan prasarana perhubungan, efisiensi anggaran mencapai 8,21% pada persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik. Kemudian, pada persentase sarana LLAJ dalam kondisi baik, efisiensi anggaran sebesar 40,00%. Selain cukup signifikan, penggunaan anggaran memberikan dampak positif pada tingkat capaian kualitas sarana. Terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, terjadi efisiensi anggaran yang cukup baik, mencapai 3,15%. Karena capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, efisiensi anggaran pada aspek ini menunjukkan kesesuaian antara alokasi anggaran dengan tingkat capaian yang diharapkan. Kemudian pada keselamatan perkeretaapian, terdapat efisiensi anggaran tertinggi yaitu 15,19%.

Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan perlu melakukan evaluasi mendalam terkait alokasi anggaran pada setiap aspek kinerja. Analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk peningkatan efisiensi anggaran dan optimalisasi pencapaian target strategis yang telah ditetapkan.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,00%					
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100,00%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	100,00%	Menunjang	Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta menciptakan tata ruang perkotaan yang lebih teratur dan aman
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100,00%					
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	0%	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*)	-91,47%	Menunjang	Menunjukkan upaya dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan infrastruktur perairan
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	100%	Menunjang	Kebutuhan infrastruktur keselamatan perkeretaapian terpenuhi dengan baik

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan memiliki serangkaian program yang secara keseluruhan menunjukkan komitmen untuk

meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam sektor transportasi. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki peran dalam menunjang kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta menciptakan tata ruang perkotaan yang lebih teratur dan aman bagi seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Pasuruan. Program Pengelolaan Pelayaran menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan operasional kapal dan infrastruktur maritim, sementara Program Pengelolaan Perkeretaapian mencerminkan perencanaan yang terencana dengan baik untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing sektor perkeretaapian. Beberapa program menunjukkan persentase ketecapaian yang baik, hal ini merupakan hasil restrukturisasi strategis untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menunjukkan fokus pada pengembangan infrastruktur transportasi yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan wilayah.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Pasuruan menggambarkan pengelolaan keuangan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi anggaran program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 :

Tabel 3.12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Terfasilitasinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan)	8.717.621.425	8.000.809.716	91,78%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja)	2.607.600	2.493.440	95,62%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	1.821.800	1.733.410	95,15%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	785.800	760.030	96,72%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Keuangan)	7.127.192.653	6.550.737.608	91,91%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Terlaksananya Pembayaran Rutin Gaji dan Tunjangan ASN)	7.088.502.053	6.512.467.683	91,87%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	38.690.600	38.269.925	98,91%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD)			
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah)	38.741.200	22.943.835	59,22%
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD)	38.741.200	22.943.835	59,22%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur)	1.591.600	1.526.250	95,89%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian)	1.591.600	1.526.250	95,89%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran)	132.466.300	123.472.136	93,21%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	2.940.500	2.789.150	94,85%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.117.000	4.876.394	95,30%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan)	4.408.800	3.600.000	81,65%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Tersedianya Bahan/Material)	4.000.000	0	0%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu)	6.000.000	5.906.750	98,45%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	110.000.000	106.299.842	96,64%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran)	873.062.072	779.897.948	89,33%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)	1.600.000	1.600.000	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	460.000.072	442.316.355	96,16%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	411.462.000	335.981.593	81,66%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	541.960.000	519.738.499	95,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	30.888.000	30.856.000	99,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Terpelihara dan Terbayarnya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	440.704.000	420.351.999	95,38%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (Terpeliharanya Mebel)	3.200.000	3.200.000	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya)	17.580.000	16.268.500	92,54%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Terpelihara dan Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	49.588.000	49.062.000	98,94%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	10.617.269.026	8.097.519.406	76,27%
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	7.323.548.226	6.643.987.182	90,72%
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	285.813.600	259.235.191	90,70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)	597.508.350	496.164.425	83,04%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Terpeliharanya Prasarana Jalan)	2.730.823.576	2.497.667.651	91,46%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Terpeliharanya Perlengkapan Jalan)	3.709.402.700	3.390.919.915	91,41%
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	87.085.000	85.533.105	98,22%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Terlaksananya Peningkatan Kelayakan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal)			
	Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang))	87.085.000	85.533.105	98,22%
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Terselenggaranya Pelayanan Perparkiran)	2.501.203.800	806.650.773	32,25%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota)	2.501.203.800	806.650.773	32,25%
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tersedianya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	303.024.950	298.768.854	98,60%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	33.438.800	32.902.795	98,40%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)	269.586.150	265.866.059	98,62%
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota)	34.700.000	21.574.000	62,17%
	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota)	34.700.000	21.574.000	62,17%
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota)	76.659.500	73.470.450	95,84%
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin (Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin)	76.659.500	73.470.450	95,84%
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.875.750	164.093.042	57,20%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Terlayaninya Ruas Jalan oleh Angkutan Umum)			
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota)	164.117.000	83.228.042	50,71%
	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	122.758.750	80.865.000	65,87%
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	4.171.800	3.442.000	82,51%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum	4.171.800	3.442.000	82,51%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)			
	Program Pengelolaan Pelayaran (Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran)	262.828.400	254.560.988	96,85%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota (Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota)	3.630.900	3.624.853	99,83%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota)	3.630.900	3.624.853	99,83%
	Kegiatan Penerbitan lzin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha (Terfasilitasinya Penerbitan lzin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha)	1.494.300	1.459.025	97,64%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota)	1.494.300	1.459.025	97,64%
	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Terfasilitasinya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau)	257.703.200	249.477.110	96,81%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau)	27.703.200	25.631.306	92,52%
	Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	230.000.000	223.845.804	97,32%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Terbangunnya Dermaga Sungai dan Danau)			
	Program Pengelolaan Perkeretaapian (Terlaksananya Pengelolaan Perkeretaapian)	1.068.026.200	905.790.845	84,81%
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian (Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian)	1.068.026.200	905.790.845	84,81%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian (Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian)	1.068.026.200	905.790.845	84,81%

Sumber : *Dokumen Realisasi Anggaran (P1) Dinas Perhubungan Tahun 2025*

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berhasil mencapai serapan anggaran yang sangat baik, serta menunjukkan kinerja yang efisien dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dengan total anggaran sebesar Rp 20.665.745.051, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berhasil merealisasikan keuangan sebesar Rp 17.258.680.955 hingga akhir Triwulan IV tahun 2025, mencapai tingkat serapan anggaran sebesar 83,51%. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi 4 program, 19 kegiatan, dan 38 sub kegiatan yang dirancang dengan baik.

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut mencakup sektor penunjang urusan pemerintahan daerah, lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta perkeretaapian, dengan penekanan pada efisiensi operasional, keberlanjutan, serta keselamatan transportasi. Keseriusan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam mencapai target serapan anggaran sebesar 83,51% mencerminkan manajemen keuangan yang baik dan implementasi program yang efektif. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah merancang program dan kegiatan-kegiatan

dengan baik, yang mencakup berbagai sektor seperti penunjang urusan pemerintahan daerah, lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, serta perkeretaapian. Ini menunjukkan bahwa ada perencanaan yang matang dalam alokasi anggaran untuk setiap sektor yang relevan dengan tugas Dinas Perhubungan Kota Pasuruan. Anggaran sebesar Rp 20.665.745.051 dialokasikan secara proporsional untuk mendukung program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang serta manajemen keuangan yang efektif mencakup pengendalian biaya yang ketat dan pemantauan terus-menerus terhadap pengeluaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan juga secara aktif memantau dan mengevaluasi pengeluaran untuk memastikan bahwa anggaran tidak melebihi batas yang ditetapkan, sambil tetap mempertahankan standar layanan yang tinggi. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berfokus pada keberlanjutan pembangunan dan keselamatan transportasi dengan menginvestasikan anggaran dalam teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan serta meningkatkan keselamatan publik dalam sistem transportasi yang cerdas. Salah satu kegiatan untuk menunjang keselamatan jalan umum dalam pelaksanaan pembangunan prasarana jalan di Kota Pasuruan, diantaranya adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan telah kembali sukses menyelesaikan masalah taksasi pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Masalah taksasi dalam pembayaran tagihan listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) sering kali muncul karena adanya perbedaan antara pihak pemerintah daerah dan PLN mengenai biaya yang harus dibayar. Masalah ini muncul karena tidak semua titik PJU dipasang meter listrik, sehingga biaya yang dikenakan kepada pemerintah daerah didasarkan pada sistem taksasi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam jumlah yang harus dibayar. Pada akhirnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik dengan PLN.

3.3 Inovasi

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam bidang transportasi.

Meskipun saat ini belum terdapat inovasi yang secara resmi diimplementasikan, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tetap fokus pada pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa adaptasi dan pengembangan merupakan hal yang krusial dalam menghadapi tantangan di sektor transportasi. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan senantiasa berupaya untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa seluruh aspek operasional berjalan dengan baik. Kami meyakini bahwa setiap langkah yang diambil, meskipun belum terwujud dalam bentuk inovasi, merupakan bagian integral dari upaya kami untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan Kota Pasuruan.

3.4 Penghargaan

Dinas Perhubungan Kota Pasuruan saat ini belum memperoleh penghargaan resmi dari lembaga atau instansi terkait. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja dalam bidang transportasi. Penghargaan merupakan salah satu indikator pengakuan atas kinerja dan inovasi yang dilakukan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan akan terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan berbagai pihak.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Pasuruan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025, dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 masuk kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini menandakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam mencapai visi misi kepala daerah walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan terutama terkait adanya program baru yang belum dapat dilaksanakan. Diperlukan upaya komunikasi yang lebih optimal baik dari sisi internal, yaitu mulai dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga staf, dan juga komunikasi eksternal kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain terkait koordinasi dalam merumuskan kebijakan dan program untuk mendukung visi misi kepala daerah. Tidak kalah penting untuk selalu memastikan bahwa rencana kegiatan tahun berikutnya dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi yang mendalam terhadap kinerja tahun sebelumnya dapat menjadi landasan yang kuat untuk penyusunan rencana aksi yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025 mencerminkan pencapaian yang signifikan, namun tantangan yang dihadapi juga menjadi peluang untuk peningkatan di masa depan. Dengan upaya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dapat terus memberikan

kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Pasuruan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 4.1 Hasil Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Tujuan :** Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan	100	100,00	100,00%	Sangat Tinggi	*Survey* Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
2	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	86,03%	100,00%	Sangat Tinggi	*Survey* Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
		Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi	*Survey* Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
3	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%	0%	100%	Sangat Tinggi	Data Sekunder dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan *Sample* Data Primer *Survey* oleh Bidang Teknis
4	**Sasaran :** Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	*Survey* Data Primer oleh Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
Rata-Rata					100,00%	**Sangat Tinggi**	

Sumber : *Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025*

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam mendukung visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komunikasi internal dan eksternal untuk memastikan sinergi antara SKPD dan *stakeholder*. Hal ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung visi misi kepala daerah.
2. Melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta menggunakan hasil evaluasi ini sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tahun berikutnya.

Pasuruan, 25 Februari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PASURUAN

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP 19770401 201903 1 004

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP. 197704012000031004

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP	:	197704012000031004
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TK. I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN	:	2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%
3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%
4	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	12.128.576.015,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	48.130.600,00	APBD
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	1.176.861.700,00	APBD
	JUMLAH	**Rp**	**13.353.568.315,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP. 197704012000031004

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP	:	197704012000031004
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TK. I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN /14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML						
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		100%				
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		100%				
3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39%		39%				
4	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	Persen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		100%				
CAPAIAN OUTPUT																																
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																																

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan Tahun 2025



DINAS PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP. 197704012000031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP	:	197704012000031004
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TK. I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN	:	2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	Persentase Sarana LLAJ dalam Kondisi Baik	100%	100%
3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	Persentase Pelanggaran di Bidang Pelayaran	39%	39%
4	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	Persentase Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian dalam Kondisi Baik	100%	100%

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		Sebelum		Sesudah		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	12.726.175.398,00	Rp	10.617.269.026,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	25.828.400,00	Rp	262.828.400,00	APBD
3	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	1.176.861.700,00	Rp	1.068.026.200,00	APBD
JUMLAH		**Rp**	**13.902.469.998,00**	**Rp**	**11.948.123.626,00**	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pasuruan, 18 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP. 197704012000031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	ANDRIYANTO, S.Si.T., MM.
NIP	:	197704012000031004
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TK. I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN	:	2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | OUTPUT / OUTCOME | | |

Lampiran 3 Matriks Renstra Dinas Perhubungan Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja / Bidang
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.15.01	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	**90%**	**90%**	**8.961.518.600**	**90%**	**9.967.000.000**	**90%**	**10.268.560.000**	**90%**	**10.573.990.300**	**90%**	**10.891.210.008**	**90%**	**11.217.946.308**			
			2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prensentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	90%	90%	0	90%	65.000.000	90%	69.500.000	90%	68.958.500	90%	71.027.255	90%	73.158.072			
			2.02 Administrasi Keuangan	Prensentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	90%	90%	6.575.184.600	90%	6.800.500.000	90%	7.004.515.000	90%	7.214.650.450	90%	7.431.089.963	90%	7.654.022.662			
			2.03 Administrasi Umum	Prensentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	2.264.413.000	90%	2.896.500.000	90%	2.983.395.000	90%	3.072.896.850	90%	3.165.083.755	90%	3.260.036.268			
			2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prensentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya	90%	90%	121.921.000	90%	205.000.000	90%	211.150.000	90%	217.484.500	90%	224.009.035	90%	230.729.306			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Konektivitas, Mobilitas, serta Pelayanan Bidang Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase Kelayakan Perlengkapan Jalan	**42%**	**44%**	**17.207.025.994**	**50%**	**22.129.110.412**	**60%**	**23.590.000.000**	**70%**	**25.010.000.000**	**80%**	**26.190.000.000**	**80%**	**27.650.000.000**			
			2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan	-	3%	14.193.795.993	5%	19.555.994.167	10%	20.000.000.000	20%	21.000.000.000	30%	22.000.000.000	40%	23.000.000.000			
			2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal dalam Kondisi Layak	-	-	0	100%	34.332.765	100%	60.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000			
			2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Parkir yang Tertib	-	70%	2.395.499.890	75%	1.922.992.565	80%	2.500.000.000	85%	2.700.000.000	90%	2.700.000.000	95%	3.000.000.000			
			2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketercapaian Kinerja Sub Kegiatan	-	85%	404.061.948	100%	442.888.925	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	580.000.000	100%	600.000.000			
			2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	-	62%	213.668.163	65%	132.710.263	67%	300.000.000	68%	350.000.000	69%	380.000.000	70%	400.000.000			
			2.10	Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	-	0	100%	40.191.727	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000			
			2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.13	Kegiatan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	-	0	-	0	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000			
			2.15	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.16	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (*Ships Call*)	29,30%	33%	90.233.600	38%	5.787.000	40%	470.000.000	43%	11.423.000.000	45%	18.126.000.000	50%	27.180.000.000			
			2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Izin Usaha Angkutan Laut yang Diselesaikan	-	-	0	51%	5.787.000	54%	20.000.000	58%	23.000.000	61%	26.000.000	65%	30.000.000			
	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran		2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Angkutan Laut yang Memiliki Izin	-	51%	90.233.600	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.03	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha yang Diselesaikan	-	-	0	-	0	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000			
			2.04	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota yang Diselesaikan	-	-	0	-	0	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000			
			2.05	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota																	
			2.07	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.08	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000			
			2.09	Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.10	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Diselesaikan	-	-	0	-	0	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	300.000.000			
			2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKr/DLKp untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang Diselesaikan		-	0	-	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	150.000.000			
			2.12	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	-	0	100%	10.000.000.000	100%	15.000.000.000	100%	25.000.000.000			
			2.13	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Fasilitasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	100%	500.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000			
			2.15	Kegiatan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	300.000.000	100%	300.000.000			
			2.16	Kegiatan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000			
			2.17	Kegiatan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	-	0	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000			
			2.18	Kegiatan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	-	0	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000			
			2.19	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Terselesaikan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000			
	Meningkatnya Keselamatan Perkeretaapian	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Kereta Api	-	-	0	33,30%	0	33,30%	825.000.000	16,70%	1.575.000.000	16,70%	2.250.000.000	16,70%	1.575.000.000			
			2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian yang Terselesaikan Tepat Waktu	-	-	0	100%	0	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	750.000.000	100%	75.000.000			
			2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Sarana Perkeretaapian	-	-	0	-	0	14%	750.000.000	42%	1.500.000.000	70%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000			
			2.03	Kegiatan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja / Bidang
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kabupaten/Kota																	
			2.04	Kegiatan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.05	Kegiatan Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.06	Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			
			2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0			

Sumber : *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pasuruan 2021-2026*